



**KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN**

# RENCANA KERJA TAHUNAN

**2023**

**PELABUHAN PERIKANAN  
SAMUDERA BUNGUS**  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

## KATA PENGANTAR

Saat ini organisasi publik menghadapi tantangan strategis yang cukup besar dan tekanan yang berat untuk menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Situasi ini membuat sistem kontrol manajemen pemerintah tidak cukup untuk mencapai beberapa tujuan strategis, sehingga organisasi publik diminta untuk meningkatkan kinerja mereka secara efektif, inovatif dan efisien. Untuk mencapai tujuan startegis ini maka dibutuhkan target kinerja dari organisasi.

Target kinerja ini harus SMART yaitu *Specific* (harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin diraih), *Measurable* (terukur), *Achieveable* (target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia), *Relevant* (relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab), dan *Time-bound* (target waktu yang jelas). Maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023.

Rencana Kinerja tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 ini ditetapkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pencapaian kinerja dari sasaran (target) masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari segi fisik maupun segi pembiayaan.

Padang, 31 Januari 2023  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Samudera Bungus,



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. VISI MISI .....	1
1.3. Sasaran Program .....	2
1.4. Dasar Hukum .....	5
BAB II .....	7
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN .....	7
2.1. TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN .....	7
2.2. STRUKTUR ORGANISASI .....	8
2.3. SDM PELABUHAN .....	9
BAB III .....	11
RENCANA KERJA TAHUNAN .....	11
BAB IV .....	17
PENUTUP .....	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan indikator pencapaian yang akan dicapai di Tahun 2023.....	4
Tabel 2 Komposisi PNS di PPS Bungus Berdasarkan Golongan Per Tahun 2022 .....	10
Tabel 3 Komposisi Pegawai PPS Bungus Berdasarkan Pendidikan Per Tahun 2022 .....	10
Tabel 4 Rekapitulasi Pegawai PPS Bungus Menurut Jenis Kelamin Per Tahun 2022.....	10
Tabel 5 Kegiatan Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023.....	11
Tabel 6 Matriks Rencana Kinerja PPS Bungus Tahun 2023 .....	13

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS .....	9
--	---

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Pelabuhan Perikanan pada hakekatnya dilakukan dalam rangka pemusatan kegiatan perikanan, sehingga dapat dilakukan usaha perikanan pada skala ekonomi yang efisien dan sekaligus memanfaatkan dampak kegiatan ekonomi yang terjadi didalamnya. Hal ini disebabkan karena keberadaan pelabuhan perikanan membawa dampak ganda atau *multiplayer effect* terhadap kegiatan usaha lain yang berbasis pada usaha penangkapan ikan maupun dalam bidang usaha lainnya. Dengan demikian pembangunan perikanan dapat menjadi embrio bagi pengembangan ekonomi suatu wilayah.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Dimulai dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), selanjutnya KKP menyusun Rencana Strategis 2020-2024 sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Renstra K/L. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) DJPT, maka PPS Bungus menyusun Perjanjian Kerja Pelabuhan dan Menyusun serta RKT, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

## **1.2. VISI MISI**

Visi Berdasarkan visi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024

adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sehingga untuk mewujudkan Visi tersebut, maka VISI PPS Bungus adalah sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan secara terpadu yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk dapat mewujudkan Misi dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Perikanan Tangkap, maka misi yang diemban PPS Bungus adalah :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap.
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan yang memadai dan ramah lingkungan;
- 4) Meningkatkan produktifitas, nilai tambah (Value added) dan daya saing produk perikanan untuk kesejahteraan nelayan;
- 5) Meningkatkan pengembangan sistem data/infomasi perikanan yang jelas, akurat dan tertelusur.

### **1.3. SASARAN PROGRAM**

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan bagian dari Sasaran Strategis DJPT untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau opsional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerjanya berbasis Balanced Scorecard (BSC). Adapun Sasaran Kegiatan PPS Bungus, antara lain :

Pendapatan Nelayan Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja meliputi :

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
  - a) Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus  
(Rp. Juta)
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat

- a) Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
3. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
  - a) Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
4. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
  - a) Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
  - b) Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (orang)
5. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal
  - a) Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing
  - a) Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)
  - b) Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)
7. Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
  - a) Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)
8. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
  - a) Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)
  - b) Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)
9. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
  - a) Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)
  - b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)
  - c) Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)

- d) IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)
- e) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)
- f) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)
- g) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)
- h) Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)

Tabel 1. Target dan indikator pencapaian yang akan dicapai di Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.337
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.770
3.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1
		5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (orang)	30
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	83
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	2
7	Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20

8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)	1
		11	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	220
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	45,1
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
		14	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93
		15	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5
		18	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	82

#### 1.4. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2) Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 5) Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Keppres nomor 72 tahun 2004.
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
- 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
- 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.20/PERMENKP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan.
- 10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 11) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Nomor: DIPA-032.03.2.531488/2023 tanggal 30 November 2022.

## **BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN**

### **2.1. TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN**

Pengelolaan perikanan pada hakekatnya dilakukan guna mendukung pembangunan nasional. Dalam mendukung kegiatan pengelolaan perikanan, pelabuhan perikanan dibangun sebagai bentuk pemusatan kegiatan usaha perikanan, sehingga dalam melakukan usaha perikanan akan lebih efisien dan diharapkan aktivitasnya menimbulkan multiplier effect terhadap berbagai sektor lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, definisi pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut :

#### **A. Fungsi Pemerintahan**

- 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;

- 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawaskapal perikanan;
- 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- 10) Pemantauan wilayah pesisir;
- 11) Pengendalian lingkungan;
- 12) Kepabeanan; dan/atau
- 13) Keimigrasian.

#### B. Fungsi Pengusahaan

- 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) Pelayanan bongkar muat ikan;
- 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- 4) Pemasaran dan distribusi ikan;
- 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 8) Wisata bahari; dan/atau
- 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

#### a. Sub Bagian Umum

Tugas :

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kemas, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

#### b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai

dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

### 2.3. SDM PELABUHAN

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada baik sarana,

prasarana maupun sumberdaya manusia yang ada. Pada tahun 2022 jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tercatat sebanyak 93 orang, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51 orang (54,83%), TKK sebanyak 17 orang (18,3%) dan tenaga kerja *outsourcing* sebanyak 25 Orang (26,9%). Dari sisi tingkat pendidikan PNS dan tenaga kontrak yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus rinciannya dapat dilihat pada tabel 1 & 2 di bawah ini.

Tabel 2 Komposisi PNS di PPS Bungus Berdasarkan Golongan Per Tahun 2022

JENIS KELAMIN	GOLONGAN					JUMLAH
	I	II	III	IV	PPPK	
LAKI-LAKI	0	6	26	3	2	37
PEREMPUAN	0	2	10	3	0	15
JUMLAH	0	8	36	6	2	52

Tabel 3 Komposisi Pegawai PPS Bungus Berdasarkan Pendidikan Per Tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SMP	SD	
<b>1. Pegawai Negeri Sipil</b>									
	LAKI-LAKI	3	7	9	2	15	1	-	37
	PEREMPUAN	3	7	-	1	4	-	-	14
	JUMLAH	6	13	7	3	19	1	-	52

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SMP	SD	
<b>2. TKK</b>									
	LAKI-LAKI	-	9	-	2	1	-	-	12
	PEREMPUAN	-	3	-	2	-	-	-	5
	JUMLAH	-	10	-	3	3	-	-	17

Tabel 4 Rekapitulasi Pegawai PPS Bungus Menurut Jenis Kelamin Per Tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
PNS	LAKI-LAKI	37
	PEREMPUAN	15
TKK	LAKI-LAKI	12
	PEREMPUAN	5
OUTSOURCING	LAKI-LAKI	22
	PEREMPUAN	3

## BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN

### 3.1. PERENCANAAN

Untuk mencapai target setiap sasaran strategis, PPS Bungus telah merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023, yang terbagi dalam 5 (lima) kegiatan utama, yaitu :

Tabel 5 Kegiatan Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2023 (Rp.)
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		3,132,266,000
1	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	376,400,000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2,597,616,000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4,000,000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	154,250,000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		12,319,811,000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12,319,811,000

Berdasarkan 5 (Lima) kegiatan utama tersebut, dibagi kedalam beberapa target output kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap ikan (2337)
  - Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan sebanyak 30 Produk
  - Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan sebanyak 30 Orang
  - Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan sebanyak 1 Produk
- 2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (2338)
  - Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar Rp. 1.337 Juta
  - Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus nilai 83
  - Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya sebanyak 2 Lembaga

- Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur sebanyak 1 Unit
- 3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (2339)
- Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya sebanyak 20 Orang;
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (2341)
- Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional di 1 Lembaga;
  - Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan sebanyak 220 laporan;
- 5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan (2342)
- Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 5770 Ton;
  - Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan sebesar 45,10;
  - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 75 Persen;
  - Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 93 Persen;
  - IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Indeks 80;
  - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 77,5 Persen;
  - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 77,5 Persen;
  - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 89;
  - Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 82.

### **3.2. RENCANA KINERJA**

Dengan perencanaan kegiatan tersebut, dapat dirumuskan penentuan target pada setiap kegiatannya. Dasar dalam penentuan sasaran serta besarnya target yang ditetapkan, antara lain: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dan Analisa perkembangan data operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun terakhir serta kondisi lain yang terkait.

Hal ini bertujuan untuk mencapai dan merealisasikan rencana kinerja tahunan 2023 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun matrik kinerja pelabuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6 Matriks Rencana Kinerja PPS Bungus Tahun 2023

URAIAN	KODE	URAIAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL
Program	032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				3,132,266,000		
Kegiatan	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan. Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan				376,400,000		
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kapal Perikanan. dan alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
KRO	2337.ACA	Perizinan Produk	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	50	Produk	350,000,000		
RO/ Komponen/ Detil	2337.ACA.00 1.052	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan				350,000,000		
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
KRO	2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	30	Orang	13,000,000		
RO/ Komponen/ Detil	2337.BDC.00 1.052	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan				13,000,000		
KRO	2337.PCA	Perizinan Produk	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1	Produk	13,400,000		PN
RO/ Komponen/ Detil	2337.PCA.00 1.052	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan				13,400,000		
Kegiatan	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				2,597,616,000		
Sasaran Kegiatan	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
KRO	2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1.337	(Rp. Juta)	1,995,236,000		
RO/ Komponen/ Detil	2338.BGA.00 4.051	Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak				37,293,000		
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing							
KRO	2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi				1,995,236,000		
RO/ Komponen/ Detil	2338.BGA.00 2.057	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	83	Nilai	144,920,000		

RO/Komponen/Detail	2338.BGA.00 4.052	Pelaksanaan pemantauan dan analisis di Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	2	Lembaga	95,600,000		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengembangan dan Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal</b>							
<b>KRO</b>	<b>2338.RBQ</b>	<b>Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan</b>	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1	Unit	<b>602,380,000</b>		PN
RO/Komponen/Detail	2338.RBQ.00 1.051	Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur				602,380,000		
<b>Kegiatan</b>	<b>2339</b>	<b>Pengelola Perizinan dan Kenelayanan</b>				<b>4,000,000</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus</b>							
<b>KRO</b>	<b>2339.QDC</b>	<b>Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat</b>	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	20	Orang	<b>4,000,000</b>		PN
RO/Komponen/Detail	2339.QDC.00 3.052	Fasilitas akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (Perbankan dan non perbankan)				4,000,000		
<b>Kegiatan</b>	<b>2341</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>				<b>154,250,000</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Tata Kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus</b>							
<b>KRO</b>	<b>2341.QGA</b>	<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi</b>	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)	1	Lembaga	<b>125,000,000</b>		PN
RO/Komponen/Detail	2341.QGA.00 1.051	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur				125,000,000		
<b>KRO</b>	<b>2341.QKB</b>	<b>Pemantauan Produk</b>	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan	220	Laporan	29,250,000		PN
RO/Komponen/Detail	2341.QKB.00 1.051	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi				29,250,000		
<b>Program</b>	<b>032.03.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>				<b>12,319,811,000</b>		
<b>Kegiatan</b>	<b>2342</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</b>				<b>12,319,811,000</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat</b>							
<b>KRO</b>	<b>2342.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	45.1	Nilai	<b>11,668,071,000</b>		
RO/Komponen/Detail	2342.EBA.963 .053	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap				16,000,000		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan pelabuhan perikanan Samudera Bungus</b>							
<b>KRO</b>	<b>2342.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	45.1	Nilai	<b>11,668,071,000</b>		
RO/Komponen/Detail	2342.EBA.960 .051	Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	75	Persen

<b>KRO</b>	<b>2342.EBD</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	93	Nilai	<b>249,740,000</b>		
RO/ Komponen/ Detil	2342.EBD.95 3.052	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran				44,000,000		
<b>KRO</b>	<b>2342.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	80	Indeks	<b>52,000,000</b>		
RO/ Komponen/ Detil	2342.EBC.95 4.051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai				52,000,000		
<b>KRO</b>	<b>2342.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	77.5	Persen	<b>11,668,071,000</b>		
RO/ Komponen/ Detil	2342.EBA.994 .002.F.521115	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				8,160,000		
		Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta				4,250,000		
		Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar				5,700,000		
<b>KRO</b>	<b>2342.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	77.5	Persen	<b>11,668,071,000</b>		
RO/ Komponen/ Detil	2342.EBA.994 .002.F.521115	Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa				7,200,000		
<b>KRO</b>	<b>2342.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	77.5	Persen
RO/ Komponen/ Detil	2342.EBD.95 5.054.A.5241 11	Perjalanan dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara lingkup DJPT TA.2023 di Jakarta	19,500,000					
	2342.EBD.95 5.054.A.5241 19	Perjalanan dalam rangka penyusunan LK SMT II TA.2023 Perjalanan dalam rangka penyusunan LK SMT 1 TA 2023	20,000,000 20,000,000					
<b>KRO</b>	<b>2342.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	89	Nilai	<b>249,740,000</b>		
RO/Komponen/ Detil	2342.EBD.95 2.053	Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran				75,000,000		
	2342.EBD.95 5.054.A.5241 19	Perjalanan dalam rangka penyusunan LK SMT II TA.2023				20,000,000		
		Perjalanan dalam rangka penyusunan LK SMT 1 TA 2023				20,000,000		
<b>KRO</b>	<b>2342.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	82	Nilai	<b>249,740,000</b>		
RO/ Komponen/ Detil	2342.EBD.95 3.052	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggarani				44,000,000		

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 sebanyak 19 IKU/IK yang terbagi menjadi 9 Sasaran Program.

Pagu anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun anggaran 2023 bersumber dari rupiah murni APBN dan PNBPN yang dikukuhkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-032.03.2.531488/2023 tanggal 30 November 2022 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 15.452.077.000,-

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan lingkup PPS Bungus dalam pengelolaan kegiatan Tahun 2023, sehingga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, serta dapat menghasilkan keluaran/output sesuai dengan tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pedoman ini akan terus dievaluasi setiap tahunnya untuk mengakomodir setiap perkembangan dan dinamika dalam penerapannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan.

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus perlu dilakukan perencanaan yang matang mulai dari perencanaan kegiatan, penetapan indikator kinerja pelabuhan, penganggaran, teknis pelaksanaan kegiatan hingga pengawasan serta monitoring dan evaluasinya.